

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. VISI : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
3. MISI :

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas

2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan

3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6.121.943,0
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	4.485.000,0
04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	7.500.000,0
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	28.122.645,0
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	909.861,0

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		47.139.449,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing		134.285.416,0
01.01	Pertumbuhan Ekonomi	5,3–5,6	
01.02	Tingkat Inflasi	1,5–3,5	
02	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas		293.830.838,0
02.01	Nilai Reformasi Birokrasi	83	
Total			428.116.254,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN	
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027
035.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	165.935.416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165.935.416,0	176.327.097,0	178.440.803,0
035.WA	Program Dukungan Manajemen	293.830.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293.830.838,0	336.574.499,0	340.902.568,0
Total		459.766.254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459.766.254,0	512.901.596,0	519.343.371,0

Jakarta, 07 Januari 2025
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Susi Wijono
NIP. 196907071989121001

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG

:

01 - Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing
3. PROGRAM

:

Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6.121.943,0
02.08	Diplomasi Ekonomi	1.121.943,0
02.16	Ekonomi Digital	5.000.000,0
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	4.485.000,0
03.06	Pendalaman Sektor Keuangan	4.485.000,0
04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	7.500.000,0
04.06	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.500.000,0
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	28.122.645,0
05.01	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	700.000,0
05.02	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	13.600.000,0
05.03	Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	2.000.000,0
05.04	Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	10.822.645,0
05.05	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	1.000.000,0

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	909.861,0
07.14	Pengendalian Inflasi	909.861,0
Total		47.139.449,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas		13.500.000,0
01.01	Persentase Penugasan Pemerintah kepada BUMN yang Berhasil diselesaikan	90	
01.02	Total Asset Turnover BUMN	0,31	
01.03	Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri	90	
01.04	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	90	
01.05	Nilai Penyaluran KUR	266-296	
02	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas		17.100.000,0
02.01	Jumlah PTA/FTA/CEPA dengan negara potensial, negara mitra utama, negara tetangga, perbatasan, regional, dan sub regional (PTA/FTA/CEPA)	22 (akumulatif)	
02.02	Jumlah Dokumen Initial Memorandum Akses OECD	1	
02.03	Nilai PMA dan PMDN	1.868,23-1.905,60	
02.04	Jumlah Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral, Regional, dan Multilateral	40	
02.05	Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	3	
02.06	Tingkat Inflasi	1,5-3,5	
02.07	Persentase Pemerintah Daerah yang Masuk Tahap Digital Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	85	
02.08	Persentase Penyelesaian Isu terkait Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri	90	
02.09	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	90	
03	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan Dan Ekonomi Digital yang Berkualitas		16.500.000,0

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
03.01	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9	
03.02	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa	21-21,6	
03.03	Indeks Literasi Keuangan	57,25	
03.04	Biaya Logistik terhadap PDB	13,5	
03.05	Indeks Keberdayaan Konsumen	63	
03.06	Persentase Penyelesaian Isu terkait Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri	90	
03.07	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Perniagaan dan Ekonomi Digital	90	
04	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Energi Dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas		0,0
04.01	Indeks Ketahanan Energi	6,77	
04.02	Pencapaian Jumlah Volume BBM Bersubsidi	19,41	
04.03	Pertumbuhan PDB Listrik	4,8-4,9	
04.04	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20	
04.05	Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per kapita	9.170,56	
04.06	Persentase Penyelesaian Isu terkait Energi dan Sumber Daya Mineral yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri	90	
04.07	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral	90	
05	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan Dan Pariwisata yang Berkualitas		21.700.000,0
05.01	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,2-20,8	
05.02	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	3,3	
05.03	Proporsi Penciptaan Tenaga Kerja Formal	41,33	
05.04	Rasio PDB Pariwisata	4,6	
05.05	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional	100 (32 dari 32 proyek)	
05.06	Persentase Penyelesaian Isu terkait Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri	90	
05.07	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	90	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
07	Terwujudnya Kebijakan untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing		16.500.000,0
07.01	Rasio Pertumbuhan Realisasi Investasi KEK Terhadap Pertumbuhan Realisasi Investasi Nasional	n/a	
09	Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian		48.985.416,0
09.01	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang diterima Menko Perekonomian	100%	
Total			134.285.416,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	5.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.500.000,0	6.464.650,0	7.567.850,0	7.771.050,0
2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal	3.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500.000,0	3.501.000,0	3.502.000,0	3.503.000,0
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	9.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000.000,0	11.955.000,0	12.059.000,0	11.963.000,0
2499	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	2.596.385,0	2.604.677,0	2.611.677,0
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	2.005.000,0	2.009.000,0	2.014.000,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
2503	Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	3.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	3.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.300.000,0	3.247.350,0	3.247.350,0	3.247.350,0
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	2.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700.000,0	2.700.000,0	2.700.000,0	2.700.000,0
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.012.000,0	3.024.000,0	3.283.000,0
4539	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	4.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500.000,0	5.510.991,0	5.520.995,0	5.530.998,0
4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
4541	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	1.750.000,0	1.750.000,0	1.750.000,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	1.342.018,0	1.342.018,0	927.000,0
4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.075.000,0	3.300.000,0	3.025.000,0
4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0	4.065.770,0	4.171.770,0	4.171.770,0
4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0	6.300.000,0	6.615.000,0	6.945.750,0
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	33.985.416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.985.416,0	35.734.276,0	35.753.276,0	35.752.276,0
5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0
6920	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
6921	Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0	4.614.447,0	4.617.447,0	4.620.447,0
6922	Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
6923	Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK	4.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0
6924	Koordinasi Peraturan Perundang-undangan, Hukum, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.700.000,0	2.700.000,0
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	3.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.600.000,0	3.600.000,0	3.600.000,0	3.600.000,0
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
7704	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	5.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.300.000,0	5.303.210,0	5.306.420,0	5.309.630,0
7706	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	2.750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.750.000,0	2.750.000,0	2.750.000,0	2.750.000,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
7707	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
7708	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
7709	Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
7710	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
7711	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
7712	Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
Total		165.935.416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165.935.416,0	176.327.097,0	178.440.803,0	178.475.948,0

Jakarta, 07 Januari 2025
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Susiwijono
NIP. 196907071989121001

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik		262.272.212,0
01.01	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	83	
01.03	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB	80%	
01.04	Survey Kepuasa Masyarakat	3,8	
01.05	Indeks SPBE	3,85	
01.06	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	
01.07	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang dimanfaatkan	85%	
02	Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik		31.558.626,0
02.01	Nilai SMART Satker Sekretariat Jenderal Kawasan Ekonomi Khusus	90	
02.02	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	3 dari 4	
Total			293.830.838,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
2486	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	16.594.188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.594.188,0	21.144.053,0	21.478.053,0	21.485.053,0
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0	4.200.000,0	4.410.000,0	4.630.500,0
2488	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum	225.528.024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225.528.024,0	262.194.421,0	264.356.596,0	266.597.739,0
2489	Pengawasan Inspektorat	1.150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150.000,0	1.215.000,0	1.280.000,0	1.345.000,0
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	6.258.999,0	7.812.493,0	9.765.617,0
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0	10.002.400,0	10.004.800,0	10.007.200,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
6919	Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	31.558.626,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.558.626,0	31.559.626,0	31.560.626,0	31.561.626,0
Total		293.830.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293.830.838,0	336.574.499,0	340.902.568,0	345.392.735,0

Jakarta, 07 Januari 2025
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Susi Wijono
NIP. 196907071989121001